

PANDANGAN TIMUR TENGAH TERHADAP KEBIJAKAN LARANGAN BERJILBAB DI PRANCIS

Setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur anggota masyarakatnya. Undang-undang yang mengatur untuk larangan penggunaan Jilbab di negara Prancis merupakan sepenuhnya hak dari negara tersebut, dalam hal ini peraturan dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sehingga peraturan harus tetap di jalankan, dan masyarakat menerima apapun konsekuensinya. Melihat hal ini, pandangan Masyarakat Timur Tengah mengenai kebijakan ini adalah tidak setuju terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Prancis. Beberapa pendapat dikemukakan atas dasar keagamaan mereka bahwa, setiap individu memiliki hak dan kewajiban. Hak untuk memeluk agama, dan memiliki kepercayaan, serta kewajiban untuk melakukan perintah-perintah yang di syaratkan dalam agama yang dianut. Dalam Islam Berjilbab merupakan hal yang wajib dan harus di penuhi oleh para ummatnya lebih khusus kaum perempuan, karena bagi mereka berjilbab/berhijab merupakan identitas diri dari kaum perempuan islam. Terdapat juga pendapat mengenai kebijakan ini yang dilihat dari sudut pandang HAM bahwa kebijakan ini mendiskriminasi kaum perempuan Islam, dan tidak menghargai kodrat mereka. Bagi Masyarakat Timur Tengah kebijakan ini harusnya dipertimbangkan karena kebijakan ini merupakan kebijakan yang tidak tepat ketika dilihat dari sisi keagamaan dan HAM. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang keliru dan menyeleweng.